RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2025-2045	
2025	
QANUN KOTA LANGSA NO.1, LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2025 / NO 1, 8 HLM	
QANUN KOTA LANGSA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2025-2045.	
ABSTRAK	- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
	- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi UndangUndang.
	- Dalam Qanun ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Langsa Tahun 2025-2045. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045, dan tahun 2045 dipergunakan sebagai masa penyelesaian, evaluasi dan persiapan keberlanjutan RPJPD tahap berikutnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Qanun ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Qanun ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk mencegah kekosongan Rencana Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2045 yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan RPJPD. RPJPD merupakan dokumen rencana pembangunan daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro berwawasan 20 (dua puluh) tahun dan memuat visi dan misi daerah. RPJPD akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan menjadi acuan untuk menyusun visi dan misi dalam pemilihan kepala daerah
CATATAN :	Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 Maret 2025, dan ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2025.